

Prodi Administrasi Publik

jurnal Dewi Intan

-  jurnal Dewi Intan
-  Fisip
-  Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3669910127****Submission Date****Oct 5, 2026, 12:31 PM UTC****Download Date****Oct 5, 2026, 12:33 PM UTC****File Name****jurnal_Dewi_Intan.pdf****File Size****313.9 KB****10 Pages****4,090 Words****28,181 Characters**

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 10 Excluded Sources

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 14%  Publications
- 14%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 27% Internet sources
- 14% Publications
- 14% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umsu.ac.id	2%
2	Internet	etd.umy.ac.id	2%
3	Student papers	Lambung Mangkurat University	2%
4	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	2%
5	Internet	eprints2.undip.ac.id	1%
6	Internet	journal.pubmedia.id	<1%
7	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
8	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
9	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium	<1%
10	Internet	repository.uindatokarama.ac.id	<1%
11	Internet	repository.unigal.ac.id	<1%

12	Internet	humasjournal.my.id	<1%
13	Internet	etheses.iainkediri.ac.id	<1%
14	Publication	Gauri Rafelina, Amellia Jatikusuma, Muh Fakhrihun Naam, Nitya Apranadyanti. "I...	<1%
15	Internet	jer.or.id	<1%
16	Internet	ojs.trilogi.ac.id	<1%
17	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	<1%
18	Internet	adoc.pub	<1%
19	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<1%
20	Student papers	Universitas Muhammadiyah Gombong	<1%
21	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
22	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember	<1%
23	Internet	eprints.untirta.ac.id	<1%
24	Internet	indojurnal.com	<1%
25	Internet	journal.ikopin.ac.id	<1%

26	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
27	Internet	repository.unmuhjember.ac.id	<1%
28	Internet	123dok.com	<1%
29	Student papers	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong	<1%
30	Internet	cdn.juris.id	<1%
31	Internet	penginapan.net	<1%
32	Internet	www.journal.unpas.ac.id	<1%
33	Internet	dpmd.jatimprov.go.id	<1%
34	Internet	garuda.kemdikbud.go.id	<1%
35	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
36	Internet	repository.unj.ac.id	<1%
37	Internet	discovery.researcher.life	<1%
38	Internet	ejurnal.kampusakademik.co.id	<1%
39	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%

40	Internet	repository.upi.edu	<1%
41	Internet	www.cnnindonesia.com	<1%
42	Internet	www.kilas.co.id	<1%
43	Internet	de.scribd.com	<1%
44	Internet	ejournal.appihi.or.id	<1%
45	Internet	ojs.unud.ac.id	<1%
46	Internet	www.coursehero.com	<1%
47	Internet	18215015-nitawahyuni.blogspot.com	<1%
48	Publication	Ajie Hanif Muzaqi, Tri Ambulanto. "PEMETAAN ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUN...	<1%
49	Publication	Dwi Indah Yuliyani Solihin, Abdul Wahab Podungge, Abdul Madjid Podungge. "Me...	<1%
50	Internet	ir.uitm.edu.my	<1%
51	Internet	journal.uir.ac.id	<1%
52	Internet	mafiadoc.com	<1%
53	Internet	publik.untag-sby.ac.id	<1%

54	Internet	repo.itera.ac.id	<1%
55	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
56	Internet	repository.iainpare.ac.id	<1%
57	Internet	repository.ipb.ac.id	<1%
58	Internet	repository.uinbanten.ac.id	<1%
59	Publication	Gadion Gadion. "PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL 53 UN...	<1%
60	Publication	Netty Netty, Irwandi Irwandi, Nys. Arfa. "Politik Hukum Administrasi Desa di Des...	<1%

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI BLETOK DI DESA BLETOK KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO

Dewi Intan Fajria¹, Nina Sa'idah Fitriyah², Usrotul Hasanah³.

Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

Email: dintan313@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Situbondo memiliki potensi wisata yang cukup besar, salah satunya Pantai Bletok di Kecamatan Bungatan. Pantai ini didukung oleh berbagai fasilitas seperti area parkir, dermaga, pusat kuliner, serta kegiatan Kuliner Senja Bungatan (KSB) yang melibatkan pelaku UMKM lokal. Namun, pengelolaan wisata masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurang optimalnya pengelolaan kebersihan, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan wisata. Oleh karena itu, peran pemerintah desa sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Bletok dalam pengelolaan objek wisata Pantai Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri atas informan utama dan pendukung. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) Pemerintah Desa Bletok telah menjalankan perannya melalui perencanaan, pengelolaan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta promosi dan kerja sama. 2.) Faktor pendukung meliputi potensi alam, dukungan pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi pengelolaan sampah, keterbatasan SDM, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan kawasan wisata.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Pariwisata, Pengelolaan, Pantai Bletok, Pemberdayaan

ABSTRACT

Tourism is a strategic sector that plays a role in driving regional economic development and improving community welfare. Situbondo Regency possesses significant tourism potential, notably Bletok Beach in Bungatan District. The beach is supported by various facilities such as a parking area, a pier, and a culinary center, as well as the Kuliner Senja Bungatan (KSB) activity, which involves local MSMEs. However, tourism management still faces several obstacles, such as suboptimal cleanliness management, limited human resources, and low community participation in maintaining the tourism environment. Therefore, the role of the village government is crucial for the effective and sustainable management and development of the tourist attraction.

This study aims to analyze the role of the Bletok Village Government in managing the Bletok Beach tourist attraction in Bungatan District, Situbondo Regency. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. There are five research informants, consisting

of primary and supporting informants. The data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was tested using source and technique triangulation.

The research results indicate that: 1.) The Bletok Village Government has carried out its role through planning, management, community empowerment, institutional strengthening, as well as promotion and collaboration. 2.) Supporting factors include natural potential, local government support, and community participation, whereas inhibiting factors include waste management issues, limited human resources, and low community awareness regarding the cleanliness of the tourism area.

Keywords: Village Government, Tourism, Management, Bletok Beach, Empowerment.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan dalam pembangunan nasional maupun daerah karena mampu memberikan kontribusi ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah umumnya memberikan efek domino terhadap sektor-sektor lain yang saling berkaitan. Ketika sebuah kawasan wisata mulai dikembangkan dan menjadi daya tarik bagi pengunjung, maka sektor-sektor pendukung seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kerajinan rakyat akan ikut terdorong untuk berkembang.

Pengelolaan objek wisata pada tingkat desa tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah desa sebagai aktor utama dalam pembangunan lokal. Dalam konteks otonomi desa yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola potensi lokal, termasuk sektor pariwisata. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata dapat dipahami sebagai serangkaian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, menetapkan arah pengembangan wisata, mengalokasikan anggaran, serta memastikan keberlanjutan kegiatan pengelolaan wisata.

Kabupaten Situbondo sebagai salah satu daerah di pesisir Pantai Utara Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam dan terus mengalami perkembangan. Berdasarkan pendataan Dinas Pariwisata, Perumda dan Olahraga Kabupaten Situbondo tahun 2024-2025, tercatat lebih dari 30 objek daya tarik wisata yang tersebar di berbagai kecamatan. Berbagai objek wisata tersebut menunjukkan bahwa Situbondo memiliki pesona alam yang kuat dan mampu menarik minat wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Mulai dari panorama pantai yang memanjang di sepanjang jalur Pantura, keindahan kawasan pegunungan dan air terjun, hingga pesona desa wisata yang menyuguhkan budaya dan kearifan lokal, semuanya menjadi modal penting dalam pengembangan sektor pariwisata.

Namun, banyaknya objek wisata tersebut juga menuntut adanya pengelolaan yang baik pada tingkat lokal, khususnya di desa sebagai wilayah terdekat dengan lokasi wisata. Pada banyak kasus, keberhasilan sebuah objek wisata justru sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah desa dalam pengawasan, pengembangan sarana prasarana, penguatan kelembagaan, serta kerja sama dengan masyarakat setempat.

Definisi peran merupakan seperangkat perilaku, tindakan, serta tanggung jawab yang melekat pada seseorang sesuai dengan kedudukan atau status yang dimilikinya dalam suatu struktur sosial. Peran tidak hanya dipahami sebagai posisi formal semata, tetapi lebih pada bagaimana individu atau institusi menjalankan hak dan kewajibannya secara nyata dalam kehidupan sosial.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (2012:243) yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan perannya. Menurut Soekanto (2012:243), peran terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif menunjukkan keterlibatan langsung dalam menjalankan fungsi dan kegiatan sesuai dengan posisi yang dimiliki. Peran partisipatif menggambarkan kontribusi anggota dalam mendukung dan memperkuat keberlangsungan kelompok atau organisasi.

Pantai Bletok merupakan salah satu objek wisata pesisir di Kabupaten Situbondo yang memiliki potensi berupa lahan, area parkir, dermaga, serta pusat kuliner dan kafe bagi UMKM lokal. Lokasinya yang strategis di jalur Pantura memudahkan akses pengunjung. Aktivitas wisata meliputi rekreasi pantai, memancing, kuliner, serta kegiatan Kuliner Senja Bungatan (KSB) yang melibatkan sekitar 30 pelaku usaha.

Dalam pengelolaannya, pemerintah desa memiliki peran dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan wisata. Pendapatan wisata diperoleh antara lain dari retribusi parkir sebesar Rp5.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor serta biaya sewa stand kuliner. Berbagai kegiatan seperti karaoke, lomba sound system, pertunjukan musik, dan kegiatan masyarakat juga turut mendukung daya tarik Pantai Bletok.

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan Pantai Bletok masih menghadapi permasalahan berupa penanganan sampah, keterbatasan SDM, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kurangnya pelatihan, pembinaan, dan pendampingan juga menghambat peningkatan kualitas layanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pengelola dan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui partisipasi, kerja sama, dan pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Dalam Penelitian ini Rumusan masalah adalah 1.) Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Objek Wisata Pantai Bletok Di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo?, 2.) Apa faktor pendukung dan penghambat Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Objek Wisata Pantai Bletok Di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo?

Maka Tujuan penelitian ini adalah 1.) Untuk menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Objek Wisata di Pantai Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, 2.) Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan objek wisata di Pantai Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 1, "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-asul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 206, "urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup yaitu, urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa"

2. Peran Pemerintah Desa

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "karakter, kapasitas, posisi dan tugas yang aktif berkontribusi di dalamnya" (Endarmoko,2006:467). Rivai (2006:148) mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, jadi jika dikaitkan dengan peran sebuah instansi atau kantor maka dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh instansi, sesuai dengan posisi dan kemampuan instansi atau kantor tersebut. Sedangkan menurut Soekanto (2005:244) "peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran yang dapat dilakukan sebagai individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat". Peran pemerintah desa dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan, fungsi, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh pemerintah desa sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Peran tersebut tercermin dalam kemampuan pemerintah desa untuk merencanakan, mengelola, mengarahkan, serta mengawasi berbagai aktivitas pembangunan, termasuk dalam pengelolaan potensi wisata desa.

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan. Apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan telah menjalankan suatu peran. Dalam pengelolaan wisata, pemerintah desa memiliki kedudukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur, memfasilitasi, mengawasi, dan mengembangkan potensi desa.

Peran pemerintah desa dalam penelitian ini dilihat melalui lima aspek, yaitu:

1. Perencanaan, yaitu keterlibatan pemerintah desa dalam menyusun arah dan program pengembangan wisata serta mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan desa.
2. Pengelolaan, yaitu keterlibatan pemerintah desa dalam mengatur operasional, fasilitas, pendapatan, dan pengawasan kegiatan wisata.
3. Pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya pemerintah desa memberikan kesempatan, pelatihan, pendampingan, serta fasilitas kepada masyarakat dan pelaku UMKM.
4. Penguatan kelembagaan, yaitu upaya membangun dan memperkuat

kelembagaan pengelola wisata seperti BUMDes dan kelompok pengelola wisata.

5. Promosi dan kerja sama, yaitu upaya pemerintah desa memperkenalkan objek wisata serta membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas, pelaku UMKM, dan pihak lainnya.

3. Pengelolaan Objek Wisata

Dalam pengelolaan pariwisata ini, Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus memperhatikan empat pertimbangan utama yaitu:

1. Aksesibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keadaan
2. Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis
3. Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis
4. Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode.

Dalam menghadapi isu pokok pertimbangan utama dalam pengembangan

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Menurut Edi Suharto (2017:59), pemberdayaan merupakan proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah agar memiliki kemampuan dan keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan masyarakat yang memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi mandiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini diadakan di Kantor Pemerintah Desa Bletok yang beralamat di . Jl. Raya Bletok No. 07, Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68358. Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan, Terhitung sejak tanggal 01 November 2025 sampai dengan 30 April 2026. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Informan Utama yaitu Kepala Desa, dan Informan Pendukung Ketua Pengelola Wisata, Pengunjung Wiasata, dan Pelaku UMKM. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang mencakup empat tahap: Pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata di Pantai Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

Perencanaan dalam pengelolaan objek wisata merupakan tahapan penting yang dilakukan pemerintah desa untuk menentukan arah pengembangan wisata agar dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini,

3 perencanaan pengelolaan wisata Pantai Bletok dikaitkan dengan teori peran menurut Soerjono Soekanto (2012:243) yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), dimana seseorang atau lembaga menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah desa menjalankan perannya melalui keterlibatan aktif dalam menyusun perencanaan pengelolaan wisata, pengembangan fasilitas, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.

49 Perencanaan dalam pengelolaan objek wisata Pantai Bletok telah dilakukan secara cukup baik dan bersifat partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, pengelola wisata, pelaku UMKM, serta masyarakat. Perencanaan tersebut telah memiliki dasar yang jelas melalui integrasi ke dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes serta didukung oleh penganggaran Dana Desa, sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan juga menekankan pada aspek kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta keterjangkauan harga guna meningkatkan kepuasan pengunjung dan mendorong perekonomian masyarakat lokal. Keterlibatan pengelola dan UMKM dalam proses perencanaan serta adanya koordinasi melalui musyawarah menunjukkan adanya sinergi antar pihak, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, seperti belum jelasnya arah dan target pengelolaan secara spesifik, keterbatasan variasi kuliner di luar event tertentu, serta perlunya peningkatan pembinaan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, kejelasan perencanaan strategis, serta peningkatan pendampingan agar pengelolaan wisata Pantai Bletok dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Pengelolaan Objek Wisata di Pantai Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

1 Pengelolaan objek wisata merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama pihak pengelola dalam mengatur, mengembangkan, serta menjaga keberlangsungan kawasan wisata agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, pengelolaan wisata Pantai Bletok dikaitkan dengan teori peran menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan, dimana seseorang atau lembaga menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimiliki. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki peran sebagai pihak yang mengatur kebijakan, melakukan pengawasan, serta menjalin kerja sama dengan pengelola wisata dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan wisata Pantai Bletok.

4 Menurut Soerjono Soekanto(2012:243), pelaksanaan peran dapat dilihat dari bagaimana suatu pihak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori tersebut, pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pengarah, pembina, dan pengawas dalam pengelolaan wisata agar dapat berjalan secara tertib, terorganisir, dan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM dalam pengelolaan wisata juga menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengelolaan wisata secara bersama-sama.

7 Pengelolaan objek wisata Pantai Bletok telah berjalan dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, pihak pengelola, dan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Sistem pengelolaan yang diterapkan saat ini menggunakan pola sewa

dengan melibatkan pihak ketiga, seperti KSB (Kuliner Senja Bungatan), dalam menjalankan operasional sehari-hari, sementara pemerintah desa tetap berperan dalam menentukan kebijakan, melakukan pendampingan, serta mengawasi jalannya pengelolaan. Dalam pelaksanaannya, telah terdapat aturan dan mekanisme yang mengatur aktivitas usaha, termasuk perizinan bagi pelaku UMKM serta sistem bagi hasil yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Pengelolaan ini juga dinilai mampu memberikan pengalaman yang cukup baik bagi pengunjung, ditandai dengan adanya kenyamanan, serta minat untuk melakukan kunjungan ulang. Selain itu, pengelolaan wisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui peningkatan peluang usaha bagi pelaku UMKM. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan, penataan lapak yang belum optimal, potensi konflik antar pelaku usaha, serta faktor cuaca yang sangat mempengaruhi jumlah kunjungan.

3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata di Pantai Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pengelolaan objek wisata. Dalam penelitian ini, pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan teori peran menurut Soerjono Soekanto (2012:243) yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan, dimana seseorang atau lembaga menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata juga dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di kawasan wisata.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata Pantai Bletok sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan atau event yang diselenggarakan di kawasan wisata. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga turut aktif dalam mendukung kegiatan wisata yang ada. Selain itu, dukungan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat juga terlihat melalui penyediaan fasilitas bagi pelaku UMKM serta pemberian pelatihan, seperti penggunaan sistem pembayaran digital (QRIS). Dampak dari keberadaan wisata Pantai Bletok juga dinilai cukup signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Banyak warga yang merasakan manfaat secara langsung, terutama melalui kegiatan usaha yang dijalankan di kawasan wisata.

4. Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata di Pantai Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

Menurut teori peran dari Soerjono Soekanto (2012:243), suatu peran dapat dilihat dari bagaimana seseorang atau lembaga menjalankan hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Dalam konteks pengelolaan objek wisata, pemerintah desa memiliki peran penting tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pembina, pengarah, dan pengawas dalam memperkuat kelembagaan pengelola wisata. Penguatan kelembagaan dilakukan agar pengelolaan wisata dapat berjalan secara lebih terorganisir, profesional, serta mampu menciptakan kerja sama yang baik antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kelembagaan

yang kuat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pengelolaan wisata Pantai Bletok.

Kelembagaan pengelola wisata Pantai Bletok sebenarnya sudah terbentuk, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih perlunya pembenahan dalam struktur organisasi, terutama terkait pembagian tugas dan fungsi agar pengelolaan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Peran pemerintah desa dalam penguatan kelembagaan juga sudah cukup terlihat, khususnya melalui pemberian dukungan berupa pelatihan dan arahan kepada pengelola. Selain itu, dukungan pemerintah desa juga diberikan dalam bentuk penyertaan modal dan penyediaan fasilitas yang menunjang kegiatan operasional wisata. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penguatan kelembagaan, terutama dalam aspek komunikasi. Kurangnya saling menghargai pendapat serta terjadinya miskomunikasi antar pihak menjadi hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik agar kelembagaan pengelolaan wisata dapat berjalan lebih optimal.

5. Promosi dan Kerjasama Dalam Pengelolaan Objek Wisata di Pantai Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengembangkan objek wisata melalui kegiatan promosi dan kerja sama dengan berbagai pihak agar pengelolaan wisata dapat berkembang secara optimal. Peran tersebut dapat dilihat melalui upaya pemerintah desa dalam memanfaatkan media sosial, menjalin kerja sama dengan instansi terkait, serta melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM dalam kegiatan wisata. Menurut teori peran dari Soerjono Soekanto, pelaksanaan peran dapat dilihat dari bagaimana seseorang atau lembaga menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Berdasarkan teori tersebut, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengembangkan objek wisata melalui kegiatan promosi dan kerja sama dengan berbagai pihak agar pengelolaan wisata dapat berkembang secara optimal.

Pengelola wisata memiliki peran yang cukup aktif dalam kegiatan promosi wisata. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial serta melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event di kawasan wisata sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik dan memperkenalkan Pantai Bletok kepada masyarakat luas. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan dukungan dalam kegiatan promosi, terutama melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata serta keterlibatan dalam penyelenggaraan event. Dukungan tersebut tidak hanya berupa koordinasi, tetapi juga dalam bentuk fasilitas dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan promosi wisata. Dalam pelaksanaannya, media yang digunakan untuk promosi cukup beragam, di antaranya melalui platform media sosial seperti Facebook, TikTok, dan YouTube. Penggunaan media sosial ini dinilai efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat. Di samping itu, pengelola wisata juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung pengembangan wisata, baik dalam bentuk kegiatan promosi, penyelenggaraan event, maupun bentuk dukungan lainnya.

5 6. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Objek Wisata Pantai Bletok Di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

58 Faktor pendukung dalam pengelolaan objek wisata Pantai Bletok meliputi potensi alam yang dimiliki kawasan wisata, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dan pelaku UMKM. Pantai Bletok memiliki kondisi lingkungan yang nyaman, pemandangan pantai yang menarik, serta lokasi yang strategis sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, harga makanan dan minuman yang terjangkau serta keberadaan berbagai fasilitas pendukung wisata turut meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait juga menjadi faktor penting dalam pengembangan wisata, baik melalui promosi, pelaksanaan kegiatan wisata, maupun kerja sama dalam pengembangan kawasan wisata. Berbagai kegiatan dan event yang diselenggarakan di Pantai Bletok, seperti Kuliner Senja Bungatan (KSB), lomba memancing, lomba karaoke, lomba sound system, pertunjukan musik, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya turut menjadi daya tarik tambahan yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Event-event tersebut tidak hanya memberikan hiburan bagi pengunjung, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka.

8 Faktor penghambat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Bletok meliputi permasalahan kebersihan dan pengelolaan sampah, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor cuaca. Meningkatnya jumlah pengunjung belum sepenuhnya diimbangi dengan pengelolaan sampah yang optimal sehingga masih ditemukan kondisi lingkungan yang kurang bersih dan berpotensi mengurangi kenyamanan wisatawan. Selain itu, keterbatasan kemampuan pengelola serta kurangnya pelatihan dan pembinaan menyebabkan pengelolaan wisata belum berjalan secara maksimal. Kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian kawasan wisata juga masih perlu ditingkatkan karena keberhasilan pengelolaan wisata sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Di samping itu, kondisi cuaca menjadi hambatan yang sulit dikendalikan karena Pantai Bletok merupakan wisata alam terbuka yang sangat dipengaruhi oleh hujan dan angin kencang. Ketika cuaca tidak mendukung, jumlah kunjungan wisatawan cenderung menurun sehingga berdampak pada aktivitas wisata dan pendapatan para pelaku usaha di kawasan Pantai Bletok. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas SDM, penguatan kesadaran masyarakat, serta perbaikan pengelolaan kebersihan agar pengembangan wisata dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

51 KESIMPULAN

32 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1.) Pemerintah Desa Bletok telah menjalankan perannya dalam pengelolaan objek wisata Pantai Bletok melalui perencanaan, pengelolaan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta promosi dan kerja sama. Peran tersebut diwujudkan melalui pengembangan fasilitas wisata, pengelolaan kegiatan wisata, pelibatan masyarakat dan pelaku UMKM dalam kegiatan Kuliner Senja Bungatan (KSB), serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan wisata. 2.) Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan objek wisata Pantai Bletok meliputi potensi alam yang strategis, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dan pelaku UMKM. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi meliputi

7

pengelolaan sampah yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengelolaan kebersihan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan objek wisata Pantai Bletok dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Desa Bletok.

SARAN

1. Pemerintah Desa Bletok perlu meningkatkan pengelolaan kebersihan kawasan wisata Pantai Bletok dengan menyediakan sarana kebersihan yang memadai, melakukan pembersihan secara rutin, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung melalui sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan wisata.
2. Pemerintah Desa Bletok perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat melalui pelatihan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata agar tercipta pengelolaan yang lebih optimal, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan daya tarik wisata Pantai Bletok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya Ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penelitian dan penyusunan jurnal ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Bletok, pengelola wisata Pantai Bletok, serta seluruh informan penelitian yang telah memberikan izin, bantuan, dan informasi. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

REFERENSI

- Endarmoko, E. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indradi, H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indradi, S. J. 2006. *Administrasi Publik dan Pemerintahan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soenarko, M. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.